

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru)

Ahsanul Kholqi-14010115120050
kholqiahsanul1@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, M.PP
alfirdaus_laila@yahoo.com

**Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Abstrak: Permukiman kumuh perkotaan muncul disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan masyarakat untuk bisa bersaing menjangkau dan memiliki segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Adanya permukiman kumuh bisa jadi disebabkan oleh perkembangan dari kota tersebut. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternative untuk menangani masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Salah satu yang telah dibenahi melalui Program Kotaku adalah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Tadinya Karangwaru yang merupakan kawasan kumuh, kini telah berubah menjadi kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Buntung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai. Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru bisa dikatakan sudah baik terbukti dengan adanya pengembangan dan replika program yang dilakukan oleh masyarakat. Namun masih dibutuhkan pendampingan yang dilakukan baik Konsultan maupun pemerintah daerah kepada BKM agar program tetap terlaksana dan semakin baik.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Program Kotaku, Kelurahan Karangwaru

Abstract: The Urban slums appeared because of inability or failure of the public to compete a achieve and have all the needs to support life's necessities. The existence of slums could be caused by the development of the city. Because of that, community development can be alternative solution to complete the problem of slums in Indonesia. Empowerment is a concept for giving people's big responsibility about how to work. "Kotaku" Program means to build an integrated system for slum management, which is local governments lead and collaborate with stakeholders in planning and implementation, as well as promoting community participation. One that has been addressed through the "Kotaku" Program is Karangwaru Village, Tegalrejo District, Yogyakarta City. Karangwaru is a slum area before, and now has been transformed into a safe, clean and comfortable area. The Kali Buntung River that passes through it has been revitalized so that the river water no longer overflows, and is able to accommodate high-intensity rainwater. Other that, river access is also used as a river maintenance route. The city without Slums Program in Karangwaru Village can be said to have been well proven by the development and replica of the program carried out by the community. However, assistance is still needed by both the Consultant and the local government for BKM so that the program will continue to be implemented and better.

Keyword : Community Development, Kotaku Program, Karangwaru village

PENDAHULUAN

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari dan merupakan hal yang pasti dialami setiap kota. Adanya permukiman kumuh bisa jadi disebabkan oleh perkembangan dari kota tersebut. Permukiman kumuh perkotaan muncul disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan masyarakat untuk bisa bersaing menjangkau dan memiliki segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Penyebab dari ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada dilingkungan akan mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri dan hanya mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, faktor kondisi masyarakat yang terkait satu sama lain dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dalam segi kesehatan

Menangani fenomena perumahan dan permukiman kumuh, maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Keterlibatan pemerintah dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat.

Maka dari itu pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternative untuk menangani masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin atau kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternative untuk menangani permukiman kumuh, karena dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka akan timbul rasa tanggungjawab dan kepemilikan sehingga mereka akan secara sukarela ikut merawat infrastruktur yang telah dibangun.

Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Salah

satu yang telah dibenahi melalui Program Kotaku adalah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalgrejo, Kota Yogyakarta. Tadinya Karangarangwaru yang merupakan kawasan kumuh, kini telah berubah menjadi kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Buntung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai. Warga juga dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai wadah berbagai kegiatan, menjadi destinasi kegiatan wisata, tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak, serta tempat olah raga seperti lari atau jalan santai Berdasarkan penjelasan diatas tadi maka yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Krangwaru di lihat dari persepektif pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Djohani (2003), mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Edi Suharto (2009) mendefinisikan secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari

kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto dalam buku Pemberdayaan Dalam Perspektif Kebijakan Publik, menyebutkan bahwasanny tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: 1. Seleksi lokasi/ wilayah, 2. Sosialisasi pemberdayaan, 3. Proses pemberdayaan, 4. Pemandirian masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data primer didapat melalui wawancara dengan narasumber yang terkait langsung dengan topik penelitian dan data sekunder didapat melauai observasi, dokumentasi dan melalui bacaan baik artikel, jurnal dan penelitian sejenis.

HASIL PENELITIAN

Proses Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan

kontribusi pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam peyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu: (1) sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa/Kel, (2) Pembentukan/Penguatan TIPP.

b. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh. Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial.

Pemetaan Swadaya dilaksanakan oleh TIPP bersama masyarakat yang dilakukan ditingkat RT/RW/Dusun sampai penyepakatan terhadap kondisi masalah, potensi dan usulan/gagasan masyarakat dalam upaya mewujudkan visi dan misi masyarakat. Metode yang dilakukan dalam Pemetaan Swadaya ini dapat dilakukan dengan cara transek, wawancara, sensus, FGD, pemetaan dalam bentuk tematik-tematik serta rebug warga ditingkat kelurahan/desa dalam penyepakatan hasil kajian yang akan dijadikan bahan TIPP dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Semua hasil dari pemetaan swadaya ini nantinya akan dimuat di dalam dokumen RPLP. RPLP ini disusun oleh TIPP Bersama BKM/LKM yang didampingi oleh pendamping (Tim Fasilitator) Hasil RPLP ini dilanjutkan dengan penyusunan rencana teknis yang akan dikaji/dibahas lebih mendalam oleh TIPP dilokasi prioritas permukiman kumuh yang telah disepakati akan ditangani secara keterpaduan oleh berbagai sektor.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan

merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) ditentukan beberapa permasalahan yang terjadi pada kelurahan Karangwaru seperti permasalahan pada pemanfaatan lahan, ruang terbuka, infrastruktur, aksesibilitas, kondisi bangunan, kepadatan penduduk, dan kondisi ekonomi. Berdasarkan penilaian tersebut menurut bobot nilai yang telah ditetapkan dan di sepakati bersama di dapatkan lima (5) prioritas pekerjaan untuk jangka panjang maupun pendek.

Keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam tahapan pelaksanaan, karena setiap kegiatan pembangunan BKM Tridaya Waru Mandiri selalu membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) misalnya saja KSM yang bertugas untuk drainase, KSM untuk jembatan dan KSM untuk paving jalan. Masyarakat yang terlibatpun ada yang tidak dibayar dan ada yang dibayar namun dengan setengah harga. Yang tidak dibayar biasanya mereka ikut kerja di akhir minggu karena hari lainnya mereka harus bekerja sedangkan yang dibayar setengah harga biasa kerja serabutan atau memang seorang tukang. Tidak hanya tenaga tapi juga ada masyarakat yang bantu lewat makanan untuk pekerja, material dan sumbangan

d. Tahap Keberlanjutan

Tahap Keberlanjutan sebenarnya bertujuan untuk terlaksananya perawatan dan pemeliharaan atas apa yang telah dikerjakan melalui Program Kotaku. Tanpa adanya perawatan dan pemeliharaan tentulah infrastruktur yang dibangun akan terbengkalai dan cepat rusak. Pada tahap ini BKM Tridaya Waru berhasil membentuk sebuah Lembaga baru yang bernama Komunitas Karangwaru Riverside yang merupakan salah satu organisasi dan dibentuk dari bawah (*bottom up*) dan sekaligus menjadi modal sosial buah dari pelaksanaan program Kotaku.

Sekarang ini Komunitas Karangwaru Riverside menjadi salah satu unit khusus di bawah BKM Tridaya Waru Mandiri yang mengampu perawatan dan operasional kawasan karangwaru riverside Di kelurahan karangwaru khususnya dalam hal perawatan dan pengelolaan sepanjang bantaran sungai buntung (karangwaru riverside).

Penataan Sungai Buntung

Penataan lingkungan di Kelurahan Karangwaru berdasarkan skala prioritas maka di bagi menjadi 6 (enam) segmen. Segmen 1-4 terletak di bantaran sungai buntung dan yang telah selasi pengerjaan sampai sekarang bari segmen 1, 2 dan 4, sedangkan segmen lainnya masih terkendala dalam pendanaan. Secara tidak langsung bisa dikatakan penataan permukiman kumuh di Kelurahan

Karangwaru terpusat di Sungai Buntung. Pentaan sungai buntung di Karangwaru di mulai sejak 2010 dimana program penataan waktu itu bernama Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang merupakan bahagian dari PNPM Mandiri Perkotaan. PLPBK juga merupak cikal bakal dari Program Kota Tanpa Kumuh jadi bisa dikatakan Kelurahan Karangwaru adalah salah satu wilayah yang paling awal mendapatkan dan melaksanakan Program Kotaku ini.

Sungai Buntung dipilih sebagai Kawasan prioritas utama untuk sasaran program Kotaku melalui musyawarah dan rembung masyarakat kelurahan. Adapun pertimbangan dipilihnya sungai buntung adalah karena masyarakat berfikir sungai merupakan sumber masalah kekumuhan di kelurahan Karangwaru, maksudnya bukan karena sungai buntung Karangwaru menjadi kumuh namun tentunya karena pola hidup masyarakat lah yang menyebabkan sungai kumuh. Dan ketika sungai kumuh maka sungai menjadi sumber masalah, sungai menjadi sumber penyakit, sungai menjadi pembuangan sampah dan limbah rumah, belum lagi akses jalan tidak ada baik ditepi sungai maupun jembatan untuk menghubungkan antara kampung blunyahrejo dan Karangwaru kecuali jalan utama. Sehingga

hubungan social antar kampung kurang baik

PEMBAHASAN

Program Kota Tanpa Kumuh Sebagai Proses Pemberdayaan

Dalam pelaksanaannya program Kotaku mengutamakan keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kumuh di wilayahnya, dengan didampingi konsultan atau tim pendamping dan pemerintah daerah. Menurut pandangan (Sudjatmoko, 1983), kegiatan pembangunan bisa dilakukan dengan 2 pendekatan yakni pendekatan top down dan pendekatan *bottom up*. Pembangunan dengan pendekatan *Top Down* berarti segala proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan jenis kegiatan ditentukan oleh pemerintah. Menempatkan masyarakat menjadi pasif karena sekedar menerima segala sesuatunya dari pusat. Pembangunan dengan pendekatan *Bottom Up* sendiri adalah dimana masyarakat lebih memperlihatkan perannya karena dapat memberikan gagasan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program pemberdayaan tersebut. Ide-ide dari masyarakat lebih terlihat pada pendekatan *Bottom Up* ini karena masyarakat mengetahui semua pemberdayaan yang dilaksanakan yang mana masyarakat bukan hanya sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri melainkan juga sebagai subjek dari pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan apa yang peneliti temui di lapangan, maka bisa disimpulkan bahwasannya Program Kotaku ini memiliki kedua pendekatan tersebut baik top down maupun bottom up. *Bersifat top down* dapat dilihat dari regulasi program tersebut dimana program ini merupakan program nasional yang merupakan turunan dari RPJMN yang ditindak lanjuti oleh Kementerian PUPR. Penyelenggaraan program Kotaku juga mempunyai prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap kelurahan/desa maupun kota/kabupaten. Ada kriteria-kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi agar suatu wilayah bisa menjadi sasaran dan melaksanakan program tersebut.

Namun dalam prosesnya peneliti melihat pendekatan *bottom up* lebih dominan dalam program kotaku karena pada eksekusi program dilapangan dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan/pemeliharaan, selalu melibatkan masyarakat. peran dan partisipasi masyarakat lebih dominan dari pada peran konsultan kotaku maupun peran pemerintah daerah yang di ambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum. Fungsi dari sekretariat Kotaku hanya sebagai pendamping dan dimana standar dan ketentuan lain untuk kelayakan program ditentukan oleh Pokja PKP.

Berdasarkan teori pemberdayaan yang disampaikan Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto dalam buku Pemberdayaan Dalam Perspektif Kebijakan Publik, tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1) Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemelihan lokasi dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.. Adapun kriteria sasaran program Kotaku adalah:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai Keteraturan bangunan. jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik.

Dari indikator inilah kemudian dilakukan penilaian atau skoring oleh pihak konsultan dan Pokja PKP. Jika poin atau nilai kumuhnya tinggi maka wilayah tersebut akan menjadi sasaran program Kotaku. Sehingga nantinya lokasi sasaran program mencakup kategori sebagai berikut:

- Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
- Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kel/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
- Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi

peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh

2). Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis Program Kotaku melakukan sosialisasi dari tingkat nasional, kota kabupaten hingga sampai ketinggian kelurahan/desa. Sosialisasi merupakan tahap awal dari program Kotaku, tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam program Kotaku. Kelurahan Karangwaru cukup sering melakukan sosialisasi tujuannya untuk. BKM Tridaya Waru Mandiri tidak hanya melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan tetapi juga tingkat RW, bahkan mereka langsung masuk kerumah-rumah masyarakat yang tinggal ditepi sungai buntung, agar mereka bersedia dan ikhlas rumah mereka di kerpras. Metode dengan langsung datang kerumah warga ini bisa dikatakan cukup efektif, yang awalnya banyak penolakan perlahan masyarakat mulai luluh sehingga akhirnya penataan/revitalisasi sungai buntung dapat dilaksanakan melalui program kotaku.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Maksud dari proses pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat melakukan kegiatan:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.
- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/ PME*).

Semua kegiatan tersebut diaplikasikan ke dalam Program Kotaku. Program Kotaku yang ada di Kelurahan Karangwaru menerapkan semua kegiatan tersebut. Dimana pada kegiatan pengkajian dan menyusun rencana merupakan bagian penting tahap perencanaan yang ada dalam program Kotaku. BKM Tridaya Waru Mandiri bersama masyarakat didampingi fasilitator melakukan kajian masalah dan melakukan pemetaan swadaya yang fungsinya untuk membuat masyarakat

agar paham dengan kondisi wilayahnya. Kemudian tahap selanjutnya berdasarkan kajian tersebut BKM menetapkan wilayah yang prioritas yang akan dibenahi. Dalam tahap ini masyarakat kelurahan Karangwaru sepakat menjadikan revitalisasi sungai buntung sebagai fokus utama untuk perbaikan infrastruktur wilayah kumuh.

Setelah itu barulah pelaksanaan kegiatan, penataan pun dimulai secara bertahap dari segmen yang satu ke segmen yang lainnya. Untuk mempermudah pelaksanaan maka di buatlah KSM-KSM (kelompok swadaya masyarakat), nantinya KSM inilah yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan infrastruktur revitalisasi sungai buntung disetiap komponennya. KSM ini diisi oleh masyarakat yang sebelumnya telah diberikan pembimbingan dan pembekalan tentang pembangunan infrastruktur.

Monitoring dan evaluasi selalu berjalan walaupun sekarang ini tidak ada pembangunan lagi, faskel tetap mendampingi BKM. Dari pihak Dinas PUPKP pun melakukan monitoring namun hanya ketika ada pembangunan, mereka melakukan monitoring sebanyak tiga kali setiap ada pembangunan infrastruktur yakni pada masa pra konstruksi, proses konstruksi dan pasca konstruksi

4) Pemandirian masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka arah pendampingan adalah mempersiapkan masyarakat agar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Peran tim pemberdayaan semakin lama akan semakin dikurangi bahkan berhenti, bisa saja nantinya peran tim pemberdayaan dan fasilitator digantikan oleh masyarakat itu sendiri. Waktu yang diperlukan untuk pemberdayaan tidak menentu bisa cepat bahkan bisa sangat lama, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang akan berjalan secara terus menerus, seringkali kegiatan membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Pengorganisasian menjadi poin penting dilakukan, karena untuk melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah ataupun memperbaiki keadaan seringkali tidak dapat dilakukan secara individu/perorangan, tetapi memerlukan pengorganisasian masyarakat. Melalui pengorganisasian masyarakat juga akan belajar mandiri untuk menyelesaikan permasalahan.

Program Kotaku bertujuan untuk menjadikan masyarakat belum berdaya menjadi berdaya, masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dan masyarakat mandiri berproses menjadi

masyarakat madani. Artinya program Kotaku merupakan program yang memanag bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dalam mengolah dan memecahkan permasalahan yang ada. Perlahan tim dari Kotaku mencoba mengurangi dominasinya terhadap masyarakat kelurahan.

BKM Tridaya Waru mandiri untuk sekarang ini bisa dikatakan telah menacapai tahap mandiri. Peran fasilitator telah banyak dikurangi, sebagian besar telah di ambil alih oleh BKM Tridaya Waru Mandiri. Fasilitator hanya melakukan pendampingan dan monitoring rutin bulanan. Seperti apa yang disampaikan Mas Asro selaku fasilitator untuk kelurahan Karangwaru. bahkan pada tahap sekarang masyarakat karangwaru berhasil mengembangkan dan mereplika program Kotaku untuk menanganai wilayah kumuh lainnya yang ada di Karangwaru selain sungai buntung

Pengembangan Program

Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru terfokus pada reviltalisasi sungai buntung. sejauh ini mereka telah berhasil mengerjakan tiga segmen dari enam segmen yang telah direncanakan. Tentunya ini bukan merupakan hasil yang memuaskan, namun yang menajdi menarik disini adalah masyarakat karangwaru bisa

melakukan pengembangan atau replika program kotaku untuk menciptakan wilayah dan lingkungan yang bebas kumuh. Adapun beberapa pengembangan hasil program kotaku di Kelurahan Karangwaru adalah:

- KKR (Komunitas Karangwaru Riverside), KKR merupakan kelompok yang di bentuk untuk memelihara sungai buntung.
- Minggu Guyub, sejak awal tahun 2017 KKR mulai menginisiasi beberapa event untuk menguatkan konsep delapan nilai penting sungai. Khususnya Koridor Sungai termasuk bantarannya sebagai Ruang Publik Terbuka Hijau (RPTH).
- Earth Day Celebration 2016, berbagai lomba bertema sungai yang melibatkan masyarakat diselenggarakan oleh KKR, tujuannya agar masyarakat terutama generasi muda mampu membangun memori dan ikatan emosional yang kuat terhadap arti penting sungai dalam lingkungan hidupnya.
- Omsimas (Omah Sinau Masyarakat) dan Latar Srawung, merupakan upaya masyarakat Karangwaru menyempurnakan fasilitas ruang publik. KKR memanfaatkan tanah atau lahan tidur milik warga agar bisa dikelola dan difungsikan sebagai tempat

kegiatan kepentingan umum dan aktifitas sosial.

Pengembangan diatas tentu menjadi bukti bahwasannya program kotaku tidak hanya mampu merevitalisasi sungai buntung namun bisa menjadi pemicu agar terciptanya genbrakan – gebrakan baru guna untuk megentaskan permukiman kumuh di wilayah karangwaru. Bisa dikatakan ini adalah hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program kotaku. Tentunya keberhasilan masyarakat karwangwarusehingga bisa mengembangkan program didorong oleh modal sosial yang terciptas selama proses penyelenggaraan program kotaku

Hambatan

Hambatan terbesar dalam program Kotaku di kelurahan Karangwaru adalah masalah keterbatasan dana. Biaya pembangunan infrastruktur tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Karena dana ini sangat terbataslah yang menyebabkan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Karangwaru hingga saat ini baru bisa menyelesaikan 3 (tiga) segmen dari 6 (enam) segmen yang direncanakan. Padahal pentaan sungai buntung itu sudah dimulai sejak tahun 2010 berarti dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun baru mampu mengerjakan setengah dari apa yang tertuang dalam Dokumen RPLP.

Dana pembangunan merupakan masalah yang sangat pelik, terbatasnya

anggaran yang disediakan negara tentunya akan memengaruhi perbaikan infrastruktur yang ada. Seperti apa yang terjadi di Kelurahan Karangwaru mereka baru bisa menyelesaikan setengah dari perencanaan program Kotaku. Sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi masalah dana tersebut dengan diberikannya kebebasan untuk BKM agar bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak luar, seperti apa yang tertera di pedoman umum pelaksanaan kotaku. Namun tentunya mendapatkan dana dari pihak luar selain pemerintah tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat program pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Karangwaru adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang peneliti maksud disini adalah tidak konsistennya masyarakat atau masih turun naiknya (fluktatif) semangat masyarakat untuk terlibat dalam proses program kotaku. Lebih lanjut lagi masalah kesadaran ini juga terlihat dari dominannya sekelompok orang yang sangat dominan sehingga bisa dikatakan orang yang peran aktif hanya itu-itu saja. Tidak hanya itu keikutsertaan anak muda juga sangat kurang dalam program kotaku. Munculnya fenomena tersebut tentulah bukan hal yang mengejutkan, pada dasarnya kendala yang dihadapi program pemberdayaan tentu berhubungan dengan partisipasi

masyarakatnya. Kesadaran masyarakat sendiri menjadi instrument penting untuk keberhasilan sebuah program pemberdayaan

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru terdiri dari empat tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan keberlanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam Program Program Kotaku dapat dilihat dari pelibatan masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraannya. Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah ataupun rembuk warga yang biasanya difasilitasi atau diadakan oleh pihak BKM dan konsultan.

Pada tahapan persiapan pihak BKM dan konsultan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepdaa masyarakat. Fungsi dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat agar mau turun aktif dalam penyelenggaraan program kotaku. Pada tahap perenanaan masyarakat diajak dan dilibatkan dalam penentuan visi dan misi pentaan Kawasan kumuh kelurahan dan pemetaan swadaya. Fungsi dilibatkannya masyarakat dalam tahap perencanaan adalah agar masyarakat mampu memahami permasalahan dan mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Dengan dilibatkannya masyarakat

dalam pembuatan peta swadaya tentu masyarakat akan mengenali akan permasalahan kumuh di wilayah kelurahannya.

Pada tahap pelaksanaan BKM membentuk KSM-KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Fungsi dibentuknya KSM adalah agar pembagian kerja masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jelas dan tidak semrawut. Meskipun partisipasi masyarakat bersifat sukarela namun mereka mempunyai tugas dan fungsi yang jelas. Dilain hal dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan ini tentunya akan menimbulkan rasa memiliki bahwasannya mereka telah membangun infrastruktur tersebut sehingga nantinya diharapkan apa yang telah dibangun, masyarakat akan memelihara dan merawat infrastruktur tersebut. Sejauh ini pelaksanaan penataan kawasan kumuh melalui program kotaku di Kelurahan Karangwaru baru selesai tiga dari enam segemen yang direncanakan. Terhambatnya penyelesaian program ini tidak lepas dari masih terbatasnya dana yang tersedia, karena selama ini BKM masih tergantung terhadap dana pemerintah.

Tahap terakhir yaitu keberlanjutan, masyarakat karangwaru berhasil membentuk KKR (Komunitas Karangwaru Riverside) yang mana komunitas ini bertujuan untuk menajag, merawat dan

memelihara kebersihan sungai. Komunitas ini berhasil menciptakan pengembangan baru dalam upaya mangentasan permukiman kumuh di kelurahan Karangwaru. Namun belakangan ini justru keaktifan partisipasi masyarakat mulai menurun. Sebagian besar masyarakat yang aktif hanya itu-itu saja. Bicara tentang proses pemberdayaan mempertahankan energi pemberdayaan tersebut pasca pembangunan lebih susah untuk dijaga dibandingkan ketika mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Secara keseluruhan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru bisa dikatakan cukup baik. Masyarakat bisa secara mandiri melakukan pengembangan dan replika program kotaku. Terjadinya pengembangan program berbasis masyarakat merupakan bentuk nyata dari keberhasilan pemberdayaan melalui program kotaku. Modal sosial yang terbentuk ketikan revitalisasi sungai buntung bisa berlanjut sehingga mampu menciptakan gebrakan baru untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di kelurahan karangwaru. Namun bukan berarti Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru bisa dikatakan sempurna, dari temuan peneliti dilapangan terdapat hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan program ini. Keterbatasan dana menjadi faktor utama yang

menghambat pengerjaan untuk tiga segmen yang tersisa. Kemudian dalam proses pemberdayaannya pasca pembangunan infrasturuktu perlahan partisipasi masyarakat berkurang, sangat dominannya peran beberapa orang tertentu yang itu-itu saja dan minimnya keterlibatan generasi muda untuk memelihara dan pengembangan infrastruktur yang ada tentunya dikhawatirkan nantinya hasil pemberdayaan ini tidak akan bertahan lama.

Saran

1. Harus adanya pendampingan yang dilakukan baik Konsultan maupun pemerintah daerah kepada BKM agar mereka mampu mencari dan pembangunan dari pihak luar sehingga tidak hanya tergantung kepada APBN

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, N. (2006). *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.

Budiharjo, E. (2006). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: PT. Alumni.

Creswell, John w. (2009). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafmdo Persada

Djohani, Rianingsih. (2003). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam*

atau APBD. Tebatasnya dana menjadi hambatan utama utama mengapa sampai saat ini Karangwaru baru bisa menyelesaikan tiga segmen dari enam segmen yang telah direncanakan.

2. BKM Tridaya Waru Mandiri harus segera melakukan regenerasi atau mengajak anak-anak muda agar mau ikut aktif dalam memelihara dan mengembangkan apa yang telah dihasilkan oleh program Kotaku. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang secara terus menerus dilakukan, sehingga penting keterlibatan anak muda didalamnya, agar apa yang telah dibangun di karangwaru bisa bertahan bahkan berkembang dimasa yang akan datang

Program Pengembangan Masyarakat, Bandung: Studio Driya Media

Dwidjowijoto, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nasikun, (2007), *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mardikanto, Totok.dan Soebianto, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Rahardjo, M. D. (2006). *Menuju Indonesia Sejahterah: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Khanata.

Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen Kota Dan Wilayah Realita Dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjatmoko, (1983) *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. (2005). *Perencana Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winamo, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yunus, H. S. (2005). *Manajemen Kota: Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi Andika dan kawan kawan. (2016). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lebah Madu Kelompok Tani Tahura (KTT)*. Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 19. No 1
- Basu Siaga dan kawan-kawan (2013). *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), (Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5,
- Yuliani Sri dan Gusty Putri Dhini Rosyida. (2017). *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Jurnal Wacana Publik, Vol. 1, no 2
- Maya Adita dan Susie Perbawasari. (2016). *Proses Seleksi Lokasi Pada Program Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Di Kota Depok*. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 21 No. 1
- Masya Ade dan kawan-kawan (2017). *Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru*. Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume 2, Nomor 2